

DETEKSI KECURANGAN PADA PELAPORAN KEUANGAN

Satria Yudhia Wijaya

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UPN “Veteran” Jakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the fraud on the government's financial statements. The study population was work units of the Ministry of Forestry. The sample selection uses purposive sampling method with a total sample of 691 work units vertical in the period of 2010-2012. The data analysis that used to test the hypothesis is a logistic regression analysis technique. The results show that the variable located far from the center, the unit test quotation by BPK and the ratio of IV quarter expenditure partially have positive and significant effect on the possibility of fraud on the government's financial statements. Meanwhile, the variable of work units that has been tested previously by BPK showed negative and significant effect. The variable unit that located far from the center, the unit is tested quotation BPK previously and the ratio of IV quarter expenditure simultaneously has significant effect on the possibility of fraud on the government's financial statements.

Keywords: *tested quotation, ratio of expenditure, fraud*

LATAR BELAKANG

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Rendahnya akuntabilitas merupakan sebuah kelemahan yang menjadi sorotan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah. Banyaknya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) yang memberikan opini *disclaimer* pada tingkat pusat dan daerah dapat menjadi gambaran bahwa pengelolaan keuangan tidak akuntabel.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh BPK RI

Dari tahun ke tahun, nampaknya kasus-kasus *fraud* atau biasa disebut dengan kecurangan dalam bidang keuangan baik yang berasal dari Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta selalu menjadi bahan pembicaraan hangat

di kalangan masyarakat luas. Namun, walau berbagai jenis kasus *fraud* terungkap dan telah diproses oleh hukum, belum ada indikasi bahwa tindak kecurangan itu akan segera berhenti. Justru seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak tindak *fraud* yang terungkap dan bahkan pelakunya semakin banyak dan kompleks. Entah karena sistem di negara kita yang mandul atautkah para pelaku yang selalu selangkah lebih maju. Jangankan sistem pengendalian eksternal yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mencegah adanya *fraud*, sistem pengendalian internal dalam organisasi itu sendiri pun belum tentu mampu untuk mencegah adanya *fraud*. Apalagi jika para pelaku adalah orang-orang yang melaksanakan pengendalian dan juga merupakan orang-orang yang memiliki kuasa di dalam organisasi tersebut.

Kecurangan (*fraudulent*) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan banyak menarik perhatian publik setelah terjadinya skandal disejumlah perusahaan besar dunia lainnya. *Financial Statement Fraud* (FSF) juga dapat ditemukan diseluruh sektor dalam perekonomian, termasuk pemerintahan dan organisasi nirlaba (Stalebrink dan Sacco, 2007). Sementara itu, penelitian tentang *fraud* di sektor publik masih sedikit. Salah satu hambatan dalam memahami *fraud* dalam kegiatan/program pemerintah adalah sedikitnya data yang valid dan dapat diandalkan, sedangkan hambatan yang lain adalah kesepakatan atas satu definisi *fraud* yang umum (Larson, 1983).

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas kelembagaan Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsinya maka Kementerian/Lembaga memerlukan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari-31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Salah satu celah terjadinya *fraud* pada Kementerian/Lembaga adalah dalam pelaksanaan anggaran salah satunya yaitu anggaran belanja.

Penelitian Pearson (1995) menunjukkan bahwa *financial leverage, capital turnover, asset composition dan firm size* adalah faktor yang kemungkinan signifikan mempengaruhi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Kaminski, Wetzel dan Guan (2004) menguji 21 rasio keuangan. Secara keseluruhan hanya 16 rasio yang signifikan. Hasil penelitian ini, hanya 3 rasio yang signifikan untuk 3 periode observasi dan hanya lima yang signifikan pada periode sebelum *fraud* yaitu *account receivable/total assets, cost of good sold/sales, fixed assets/total assets, inventory expenses/total liabilities, dan sales/account receivable*. Teknik uji yang digunakan adalah analisis diskriminan, kesalahan klasifikasi (*fraud* atau tidak *fraud*) berkisar antara 58-98%. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa rasio keuangan memiliki kemampuan yang terbatas untuk mendeteksi atau memprediksi FSF.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini terlihat dari variabel independen yang akan di uji oleh peneliti dan data sumber yang digunakan. Penelitian terkait *fraud* pada sektor publik yang ada sebelumnya lebih banyak menggunakan data primer yaitu kuisisioner, sementara pada penelitian ini data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu Laporan

Kuangan Kementerian dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi FSF di entitas pemerintah, khususnya pada sebuah Kementerian. Karena masih sedikitnya penelitian terdahulu tentang hal ini, landasan teori dan hipotesis didasarkan pada penelitian serupa di sektor privat. Temuan Kepatuhan atas Laporan Keuangan sebuah kementerian oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang memenuhi definisi *fraud* secara umum dijadikan ukuran apakah satuan kerja melakukan *fraud* atau tidak.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat, satuan kerja yang diuji petik oleh BPK RI, satuan kerja yang pernah diuji petik oleh BPK RI sebelumnya dan rasio belanja pada triwulan IV (Oktober, November dan Desember) terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pada laporan keuangan pemerintah, mengingat masih minimnya penelitian terkait *fraud* pada entitas pemerintah. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintah untuk mewaspadai kemungkinan *fraud* pada entitas dengan karakter seperti yang dihasilkan pada penelitian ini. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat meningkatkan sistem pengendalian intern dan pengawasannya untuk mencegah kemungkinan *fraud*.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Entity Theory

Dalam teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (Santosa dan Joni 2008), dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (*reporting entity*) yang bertanggungjawab kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya.

Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang berbunyi : tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berangkat dari ketentuan hukum di atas, maka dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dibakukan dan dipertegas eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, yang masing-masing menurut alur pikir proses dan dari sudut pandang profesi diberi batasan sebagai berikut:

- a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan penundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, terdiri dari (1) Pemerintah pusat (2) Pemerintah daerah (3) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/d daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- b. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

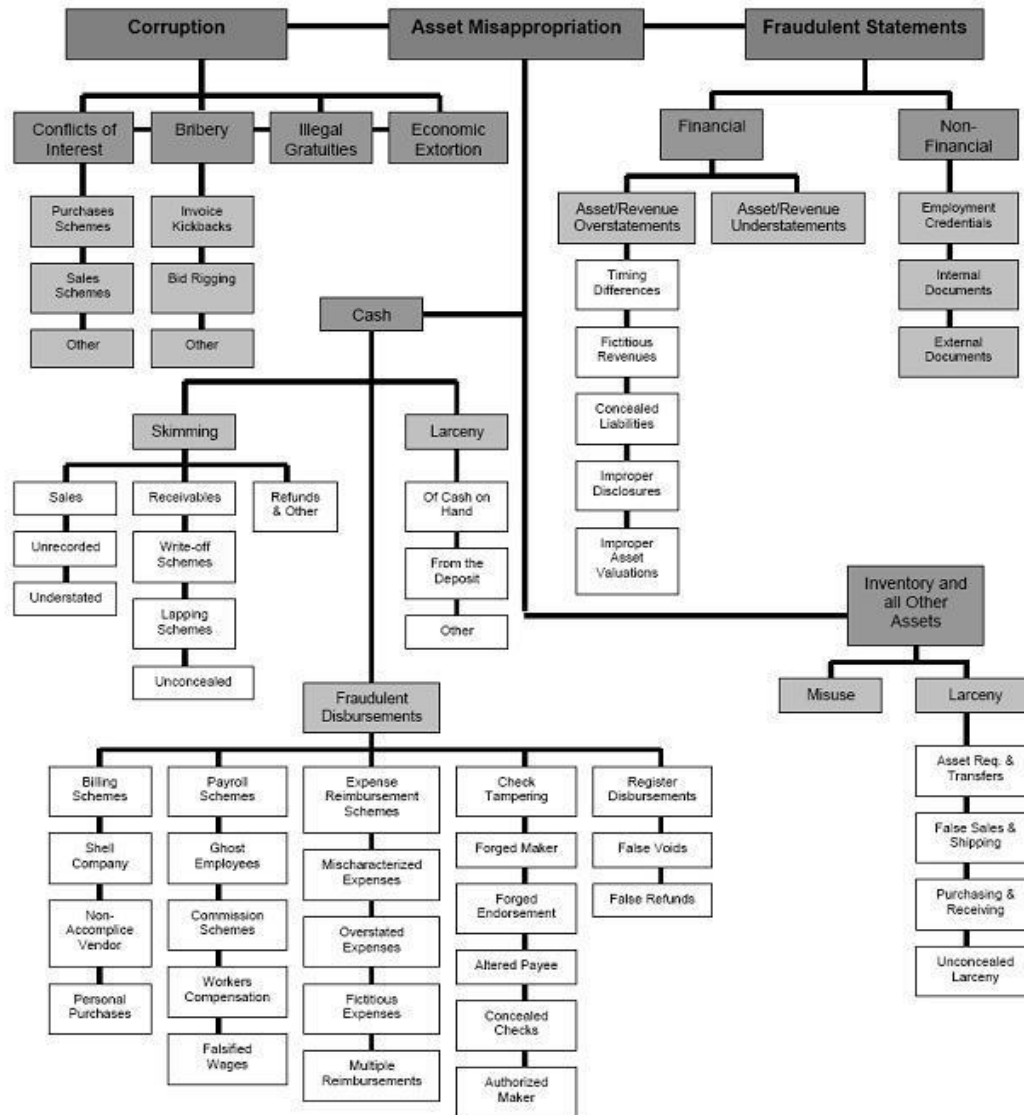
Fraud

Terdapat banyak definisi *fraud*. Secara harfiah *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. *Fraud* merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, yang mana secara langsung maupun tidak langsung, tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain, termasuk perusahaan dan negara (Anonymous, 2006). Pelaku kecurangan biasanya merupakan oknum pegawai atau orang yang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan dimana tindak kecurangan tersebut dilakukan. Biasanya, pelaku adalah orang yang tugas fungsionalnya tidak hanya menjalankan sistem pengendalian intern, tetapi juga ikut mengoperasikan sistem operasi instansi atau perusahaan. Berdasarkan definisi dari *The Institute of Internal Auditor* (IIA, 2013) adalah *Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These act are not dependent upon the threat of violence or physical force. Fraud are perpetrated by parties and organizations to obtain: money, property, or services; to avoid payment or loss of services, or to secure personal or business advantage.*

Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Korupsi merupakan kecurangan yang terjadi tata kelola yang kurang baik serta penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*). Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur (1) perbuatan melawan hukum; (2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; (3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan (4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, *fraud* mempunyai lingkup yang lebih luas daripada korupsi.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) di Amerika Serikat menyusun peta mengenai *fraud*. Peta ini berbentuk pohon, dengan cabang dan ranting. Tiga cabang utama dari *fraud tree* ini adalah *Corruption*, *Asset misappropriation* dan *fraudulent statement*. Turunannya lebih jauh dapat dilihat dalam gambar 1.

Uniform Occupational Fraud Classification System



Gambar 1 *Peta Fraud*

Financial Statement Fraud (FSF)

FSF adalah upaya yang sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk menipu atau menyesatkan pengguna laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, dengan menyusun dan menyebarluaskan laporan keuangan yang salah secara material (Rezaee, 2005). FSF mungkin menggunakan pola (1) pemalsuan, penggantian atau manipulasi arsip keuangan, dokumen pendukung atau transaksi bisnis yang material; (2) dengan sengaja mencantumkan, menghilangkan atau salah menyajikan kejadian, transaksi, akun atau informasi penting lainnya yang material dari laporan keuangan yang disusun; (3) dengan sengaja salah menerapkan, mengartikan, dan melaksanakan standar, prinsip, dan metode akuntansi dalam mengukur, mengakui, dan melaporkan kejadian ekonomis atau transaksi bisnis; (4) sengaja menghilangkan dan mengungkapkan atau menyajikan disclosure yang tidak memadai atas standar, prinsip, praktek akuntansi dan

informasi terkait informasi finansial; (5) menggunakan teknik akuntansi yang agresif melalui manajemen laba yang tidak sah; dan (6) manipulasi praktek akuntansi dibawah standar akuntansi berbasis aturan yang ada yang telah menjadi terlalu detail, mudah di pintas dan mengandung celah yang membuat perusahaan dapat menyembunyikan subdtansi ekonomis dari kinerjanya.

Lebih jauh lagi, Rezaee (2005) menyatakan bahwa kesempatan untuk melakukan *Financial Statement Fraud* (FSF) semakin besar ketika struktur pengawasan perusahaan lemah, *corporate governance* nya kurang efektif, kualitas dari fungsi auditnya menurun. Perusahaan berani mengambil resiko melakukan FSF dengan segala konsekuensinya selama terdapat ketidakpastian apakah penipuan tersebut akan diketahui atau tidak. Dengan adanya ketidakpastian ini, perusahaan mungkin melakukan FSF bila mereka (1) terancam melanggar ketentuan GAAP dengan mengeluarkan laporan keuangan yang berisi kecurangan sebagai praktek akuntansi yang dapat diterima; (2) termotivasi untuk melakukan kecurangan aktivitas keuangan sebagai repons atas tekanan ekonomi dan kepemilikan; dan (3) memiliki kesempatan untuk menyajikan laporan keuangan dengan kecurangan karena pengawasan *corporate governance* yang tidak bertanggung jawab dan tidak efektif.

Pengembangan Hipotesis

Proksi *fraud* dalam penelitian ini adalah temuan Kepatuhan BPK RI yang memenuhi definisi *fraud*. Temuan yang memenuhi definisi *fraud* pada penelitian ini adalah temuan yang terdapat unsur kerugian Negara di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Bab I pasal I yang dimaksud Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Beberapa temuan yang memenuhi kriteria tersebut antara lain adalah temuan Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Kemahalan Harga. Temuan yang dimasukkan dalam pengujian hanya temuan yang telah disetujui oleh *auditee*.

Kemungkinan Terjadinya *Fraud* pada Satuan Kerja yang Lokasinya Jauh dari Pusat.

Satuan kerja Kementrian tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa satuan kerja bahkan berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Kendala tersebut bisa jadi menyulitkan pengawasan dan sistem pengendalian internal (SPI) yang dilakukan oleh pusat, sehingga kemungkinan untuk terjadinya *fraud* lebih besar dibandingkan satuan kerja-satuan kerja yang berada di pulau Jawa yang relatif dekat, mudah dijangkau dan tidak memiliki hambatan dalam berkomunikasi dengan pusat.

SPI yang pada suatu organisasi atau instansi sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan, sehingga *fraud* dapat ditekan dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif dalam suatu organisasi atau instansi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Wilopo (2006) yang menemukan bahwa semakin baik dan semakin efektif suatu pengendalian internal maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor

pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012), Sanusi et al (2012), Najahningrum (2013) dan Faizal (2013) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negative antara SPI dengan *fraud* pada instansi/organisasi.

Walaupun demikian Inspektorat Jenderal Kementrian selaku auditor internal, secara rutin melakukan audit ke semua satuan kerja tanpa memandang lokasi satuan kerja tersebut. Sehingga bisa jadi tingkat SPI adalah sama dan tidak tergantung pada lokasi satuan kerja. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesa masalahnya adalah sebagai berikut:

H1: *Kemungkinan terjadinya fraud lebih tinggi pada satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat.*

Kemungkinan Terjadinya Fraud pada Satuan Kerja yang Diuji Petik oleh BPK RI.

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan Negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud, perlu dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara pasal 6 disebutkan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.

Kementerian dalam hal ini termasuk dalam Pemerintah pusat yang melakukan pengelolaan keuangan, pemeriksaan dilakukan pada satuan kerja yang berada di bawah Kementerian. Dalam UU No 15 tahun 2004 disebutkan bahwa penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

Satuan kerja yang diuji petik BPK RI akan terdapat temuan meskipun temuan tersebut belum tentu *fraud*. Satuan kerja yang tidak diuji petik belum tentu tidak terdapat *fraud* pada pelaksanaannya karena metode pemeriksaan BPK RI adalah sampling. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesa masalahnya adalah sebagai berikut

H2: *Kemungkinan fraud lebih tinggi pada satuan kerja yang diuji petik oleh BPK RI.*

Kemungkinan Terjadinya Fraud pada Realisasi Belanja Triwulan IV.

Rasio profitabilitas menunjukkan kesuksesan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Laba perusahaan merupakan salah satu ukuran baik tidaknya kinerja suatu perusahaan. Penelitian George (2009) menunjukkan bahwa variabel *Return on Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan, sementara penelitian Gerety dan Lehn (1997) menunjukkan bahwa organisasi dengan kinerja yang lebih buruk akan lebih mungkin untuk melakukan *fraud* karena adanya tekanan dari stakeholder.

Ukuran kinerja dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio realisasi belanja triwulan IV.

Salah satu kendala dalam realisasi anggaran di Kementerian/ Lembaga adalah ada beberapa mata anggaran belanja yang dipending pencairannya oleh Kementerian Keuangan sebelum syarat-syarat tertentu dipenuhi. Misalnya anggaran untuk pembelian mobil dinas, pencairannya harus menunggu mobil dinas yang lama resmi dihapuskan. Hal ini menjadi salah kendala realisasi belanja barang maupun belanja modal baru dapat direalisasikan di penghujung tahun. Triwulan IV biasanya menjadi periode dimana realisasi belanja tertinggi terjadi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. dengan adanya tekanan seperti ini, ditambah dengan tuntutan untuk merealisasikan belanja negara setinggi-tingginya, diasumsikan bahwa satuan kerja cenderung untuk tidak berhati-hati dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian kemungkinan terjadinya *fraud* menjadi lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesa masalahnya adalah sebagai berikut

H3: *Rasio realisasi belanja pada triwulan IV dibandingkan dengan total realisasi belanja, secara positif mempengaruhi kemungkinan fraud.*

RESEARCH METHODOLOGY

Definisi Operasional

Adapun definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat.
Beberapa satuan kerja satuan kerja Kementerian berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Satuan kerja yang dianggap jauh dalam penelitian ini adalah satuan kerja yang berada di luar pulau Jawa sementara satuan kerja yang dekat dari pusat adalah satuan kerja yang berada di pulau Jawa. Variabel Satuan Kerja yang lokasinya jauh dari pusat diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu angka 0 (nol) satuan kerja yang berada di pulau Jawa dan angka 1 (satu) untuk satuan kerja yang berada di luar pulau Jawa.
- 2) Satuan kerja yang diuji petik BPK RI.
Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI adalah sampling, dimana sampling wilayah sepenuhnya menjadi hak BPK RI. Pada satuan kerja yang diuji petik kemungkinan besar terdapat temuan, baik SPI maupun kepatuhan walaupun belum tentu temuan tersebut berupa *fraud*. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu angka 1 bila satuan kerja diuji petik oleh BPK RI, dan 0 bila lainnya
- 3) Rasio realisasi belanja triwulan IV
Menurut PP No 71 tahun 2010 belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Rasio realisasi belanja triwulan IV adalah total realisasi bulan Oktober, November dan Desember dibandingkan dengan total anggaran dari masing-masing satuan kerja. Variabel rasio realisasi belanja triwulan IV diukur dengan menjumlahkan total belanja bulan Oktober, November dan Desember dibagi dengan total anggaran

- 4) Variabel dependen pada penelitian ini adalah *fraud* pada Laporan Keuangan Pemerintah. Proxy *fraud* dalam penelitian ini adalah temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan BPK RI yang memenuhi definisi *fraud*. Proxy *fraud* dalam penelitian ini adalah temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan BPK RI yang memenuhi definisi *fraud*. Diukur dengan menggunakan variable *dummy*, yaitu angka 1 apabila terdapat fraud pada satuan kerja, dan 0 bila lainnya.

Sampel

Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sample dalam penelitian ini adalah satuan kerja vertikal Kementerian dengan total sampel 229 satuan kerja untuk tahun 2010, serta 231 satuan kerja pada tahun 2011 dan 2012. Alasan pemilihan sampel hanya satuan kerja vertikal adalah karena satuan kerja tersebut mempunyai anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan satuan kerja dana dekonsentrasisasi dan tugas pembantu. Komposisi anggaran satuan kerja vertikal lebih lengkap dibandingkan dana dekonsentrasi maupun tugas pembantu. Komposisi anggaran tersebut terdiri dari anggaran belanja pegawai, belanja barang/operasional dan belanja modal, sedangkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantu rata-rata hanya mempunyai belanja barang/operasional.

Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan matematis antara variabel dependen dan independen apabila variabel dependennya dua pilihan atau dapat disebut sebagai *dichotomus* (Yamin dan Kurniawan, 2011). Model regresi logistik yang digunakan yaitu :

$$\ln \frac{P(Fraud)}{1-P(Fraud)} = \alpha + \beta_1 Lok + \beta_2 Sampel + \beta_3 TW4 + \varepsilon$$

Keterangan:

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| α | = | Konstan |
| $P(Fraud)$ | = | <i>Fraud</i> pada Laporan Keuangan Pemerintah |
| Lok | = | Satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat |
| Sampel | = | Satuan kerja yang pernah diuji Petik BPK RI |
| TW4 | = | Rasio realisasi belanja triwulan IV |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ | = | Koefisien regresi |
| ε | = | <i>Error</i> |

Hasil

Kementerian memiliki delapan Eselon I, terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan 6 direktorat. Semua Eselon I memiliki Unit Pelaksana Teknis, atau biasa disebut satuan kerja vertikal, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi Kementerian yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Masing-masing satuan kerja ini memiliki anggaran tersendiri yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Eselon I Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal hanya memiliki satuan kerja pusat (satuan kerja yang berlokasi di pusat), sementara enam Eselon I lainnya selain memiliki satuan kerja

pusat, juga satuan kerja daerah (satuan kerja yang berlokasi selain di pusat). Jumlah satuan kerja vertikal Kementerian adalah 46 satuan kerja pusat dan 185 satuan kerja daerah.

Disamping itu, Kementrian juga memiliki satuan kerja Dekonsentrasisentrasi dan Tugas Pembantuan (TP). Dekonsentrasisentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah, sementara TP adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Satuan kerja Dekonsentrasisentrasi Kementerian adalah sebanyak 168, sementara TP sebanyak 3 satuan kerja. Sehingga total satuan kerja Kementerian sebanyak 402 satuan kerja (data tahun 2012). Namun fokus penelitian ini adalah pada satuan kerja vertikal (Unit Pelaksana Teknis) bukan satuan kerja Dekonsentrasi dan Tenaga Pembantu, dengan sampel sebanyak 219 satuan kerja pada tahun 2010, 221 satuan kerja pada tahun 2011 dan 2011 sehingga total sampel selama periode penelitian (tiga tahun) adalah 621. Daftar sampel terlampir.

Tabel 1 Frekuensi *Fraud*

| Remark | Freq | Percent | Cumulati ve Percent |
|--------------|------|---------|------------------------|
| Non Fraud | 570 | 82.5 | 82.5 |
| Fraud | 121 | 17.5 | 100.0 |
| Total | 691 | 100.0 | |

Sumber : Olah data

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat kita ketahui bahwa dari total sampel sebanyak 691 satuan kerja dan terdapat 121 satuan kerja yang mempunyai *fraud* atau 17,5% dari total sample yang ada.

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen dan 1 variable control, dari 3 variabel tersebut 2 diantaranya menggunakan variabel *dummy* yaitu satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat dan satuan kerja yang pernah diuji petik BPK RI sebagaimana tersaji dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 2 *Categorical Variable Codings*

| REMARK | | Freq | Percent | Paramet er Coding |
|--------|------|------|---------|-------------------------|
| SAMPLE | None | 371 | 53.69 | 1.000 |
| | Yes | 320 | 46.31 | .000 |
| LOK | None | 241 | 34.74 | 1.000 |
| | Yes | 450 | 65.26 | .000 |

Sumber : Olah data

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat kita lihat bahwa total sampel yang menjadi obyek penelitian adalah sebanyak 691 satuan kerja. Jumlah satuan kerja yang diuji petik BPK RI sebanyak 320 satuan kerja atau 46,31% dari total sampel yang ada, sementara jumlah satuan kerja yang berlokasi jauh dari pusat adalah sebanyak 450 satuan kerja atau 65,26% dari total sampel. Untuk variabel rasio belanja triwulan IV tersaji dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 3 Tabel Deskripsi Statistik

| Remark | N | Minimum | Maximum | Mean |
|--------|-----|---------|---------|---------|
| TW4 | 691 | 13.46 | 94.05 | 42.0531 |

Sumber : Olah data

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa rasio realisasi terendah adalah sebesar 13,46% hal ini berarti realisasi belanja satuan kerja tersebut sesuai dengan rencana operasional kegiatan (ROK) yang telah disusun oleh satuan kerja tersebut dan tidak tinggi di triwulan IV. Sementara rasio belanja tertinggi adalah sebesar 94,05% hal ini menunjukkan bahwa realisasi satuan kerja tersebut tidak berjalan sesuai dengan ROK karena realisasi belanja satuan kerja tersebut tinggi di triwulan IV meskipun hal ini bukan sepenuhnya kesalahan oleh satuan kerja tersebut. Hal-hal yang menjadi kendala dalam merealisasikan anggaran belanja oleh satuan kerja dapat berasal dari luar misalnya sumber dana yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tanda bintang/ blokir pada beberapa mata anggaran oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa rata-rata rasio realisasi belanja triwulan IV adalah sebesar 42,05%, dengan kata lain realisasi belanja rata-rata dari sample yang ada cukup tinggi di triwulan IV.

Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Teknik analisis ini tidak lagi memerlukan uji normalitas pada variabel bebasnya (Ghozali, 2011:333). Metode yang digunakan dalam regresi logistik ini adalah metode enter dengan tingkat signifikansi (α) 5% atau 0,05.

Pengujian Menyeluruh atau Pengujian Simultan (*Chi-Square Test*)

Pengujian simultan dilakukan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel kontrol berpengaruh secara simultan terhadap kemungkinan *fraud* pada laporan keuangan pemerintah. Hasil uji simultan dari penelitian ini tersaji sebagaimana tabel 4 berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Secara Simultan

| Omnibus Tests of Model Coefficients | | Chi-square | Df | Sig. |
|-------------------------------------|-------|------------|----|------|
| Step 1 | Step | 221.296 | 4 | .000 |
| | Block | 221.296 | 4 | .000 |
| | Model | 221.296 | 4 | .000 |

Sumber : Olah data

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil *Chi-Square goodness-of-fit test* sebesar 221,296 dengan derajat kebebasan (df) = 4 dan *P-value* (Sig) = 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti bahwa satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat, satuan kerja yang pernah diuji petik oleh BPK RI, dan rasio belanja triwulan IV berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan pemerintah secara simultan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dalam regresi logistik tidak dapat dihitung dengan regresi linier biasa. Koefisien determinasi dalam regresi logistik dihitung dengan *R Square* yaitu *Cox and Snell* dan *Nagelkerke*. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kombinasi variabel independen dan variabel control mampu menjelaskan variasi variabel dependen yaitu *fraud* pada laporan keuangan pemerintah. Hasil uji koefisien determinasi sebagaimana tersaji dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Step | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 419.806 ^a | .274 | .453 |

Sumber : Olah data

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa *Nagelkerke's R Square* adalah sebesar 0.453 atau 45,3%. Hal ini berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel control dalam penelitian yaitu satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat, satuan kerja yang diuji petik oleh BPK RI dan rasio realisasi belanja triwulan IV adalah sebesar 45,3% sedangkan sisanya sebesar 54,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Uji t

Uji parsial digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap *fraud* pada laporan keuangan pemerintah. Hasil uji t tersaji sebagaimana pada tabel 6 berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Parsial

| | B | S.E. | Wald | Df | Sig. | Exp(B) |
|----------|--------|-------|--------|----|------|---------|
| LOK | 1.059 | .298 | 12.653 | 1 | .000 | 2.884 |
| SAMPLE | 5.721 | 1.019 | 31.513 | 1 | .000 | 305.205 |
| TW4 | .024 | .010 | 5.460 | 1 | .019 | 1.025 |
| Constant | -7.432 | 1.149 | 41.856 | 1 | .000 | .001 |

Sumber : Olah data

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan regresi logistik pada tingkat signifikasi (α) 5%. Pengujian regresi logistik ini menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln \frac{P(\text{Fraud})}{1 - P(\text{Fraud})} = -7,432 + 1.059 \text{ Lok} + 5.721 \text{ Sample} + 0,024 \text{ TW4}$$

Berdasarkan hasil regresi logistik tersebut, nilai konstanta sebesar 0,001 ($e^{-7.432}$) menyatakan bahwa jika variabel satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat, satuan kerja yang diuji petik BPK RI, dan rasio TW4 dianggap konstan maka kemungkinan *fraud* pada laporan keuangan pemerintah akan bertambah sebesar 0,001.

H1: *Kemungkinan terjadinya fraud lebih tinggi pada satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat.*

Pada tabel 6 diketahui bahwa *Variabels in the Equation* koefisien satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat yang diprosikan dengan LOK mempunyai koefisien regresi positif sebesar 1,059 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α yaitu 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan pemerintah atau dengan kata lain H1 diterima. Hal ini terlihat bahwa satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar positif 1,059 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α yaitu sebesar 0,05. Dengan kata lain jika variabel lain dianggap konstan maka kemungkinan terjadinya *fraud* untuk satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat adalah 3 kali (≈ 2.884) lebih mungkin dibandingkan satuan kerja yang lokasinya dekat dari pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sanusi et al (2012), Najahningrum (2013), Pristiyanti (2012), Wilopo (2006) dan Faizal (2013) membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif antara SPI dengan *fraud*, hal ini berarti semakin efektif tingkat pengendalian intern suatu instansi maka kemungkinan *fraud* pada instansi tersebut semakin kecil atau menurun. Satuan kerja Kementerian tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa satuan kerja bahkan berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Kendala tersebut bisa jadi menyulitkan pengawasan dan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh pusat. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab sulitnya pengawasan di satuan kerja yang berada jauh dari pusat antara lain karena keterbatasan anggaran pengawasan. Keterbatasan anggaran mengakibatkan target satuan kerja yang akan dikunjungi tidak akan tercapai sepenuhnya, jumlah auditor yang akan melaksanakan audit juga terbatas serta lama waktu yang diperlukan oleh auditor juga menjadi terbatas.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wilopo (2006) dan Najahningrum (2013) membuktikan bahwa asimetri informasi memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kemungkinan *fraud*. Hambatan dalam berkomunikasi dengan pusat yang diprosikan dengan asimetri informasi. Hal ini disebabkan karena banyak satuan kerja di lingkup Kementerian yang terdapat di daerah terpencil dengan keterbatasan jaringan telfon dan internet, sehingga kemungkinan untuk terjadinya *fraud* lebih besar dibandingkan satuan kerja-satuan kerja yang berada di pulau Jawa yang relatif dekat, mudah dijangkau dan tidak memiliki hambatan dalam berkomunikasi dengan pusat.

Selain itu faktor sumber daya manusia juga berperan, dalam hal ini pegawai dengan latar belakang ekonomi khususnya akuntansi masih belum mencukupi dan sebarannya tidak merata di lingkup satuan kerja Kementerian.

H2: *Kemungkinan fraud lebih tinggi pada satuan kerja yang diuji petik oleh BPK RI*

Pada tabel 6 *Variabels in the Equation* koefisien satuan kerja yang diuji petik oleh BPK RI mempunyai koefisien regresi positif sebesar 5,72 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α yaitu 0,05. Berdasarkan hal

tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinan *fraud* lebih tinggi pada satuan kerja yang diuji petik oleh BPK RI atau dengan kata lain H2 diterima. Dengan kata lain apabila variabel lain dianggap konstan maka kemungkinan terjadinya *fraud* pada satuan kerja yang diuji petik oleh BPK RI lebih besar 305 kali dibandingkan dengan satuan kerja yang tidak diuji petik oleh BPK RI.

H3: *Rasio realisasi belanja pada triwulan IV secara positif mempengaruhi kemungkinan fraud.*

Pada tabel 6 *Variabels in the Equation* koefisien rasio realisasi belanja pada triwulan IV mempunyai koefisien regresi sebesar 0,024. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,019 lebih kecil dari α yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel rasio realisasi belanja triwulan IV mempengaruhi kemungkinan *fraud* pada laporan keuangan pemerintah atau dengan kata lain H3 diterima. Dengan kata lain semakin besar rasio belanja triwulan IV pada satuan kerja maka kemungkinan terjadinya *fraud* akan naik sebesar 1,02 untuk setiap kenaikan rasio realisasi belanja triwulan IV.

Hal ini dapat terjadi karena triwulan IV biasanya menjadi periode dimana realisasi belanja tertinggi terjadi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dengan adanya tuntutan untuk merealisasikan belanja negara setinggi-tingginya, diasumsikan bahwa satuan kerja cenderung untuk tidak berhati-hati dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan kinerja yang lebih buruk akan lebih mungkin untuk melakukan *fraud* karena adanya tekanan dari *stakeholder* (Garety dan Lehn 1997), penelitian lain menyebutkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan George (2009) dimana ROA diproksikan dengan kinerja. Rasio realisasi belanja triwulan IV pada penelitian ini merupakan proksi kinerja.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pada laporan keuangan pemerintah khususnya pada sebuah Kementerian periode 2010-2012, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji *Chi-Square test*, diketahui bahwa variabel satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat, satuan kerja yang diuji petik BPK RI, dan rasio belanja triwulan IV secara simultan kemungkinan berpengaruh terhadap *fraud* pada laporan keuangan pemerintah.
2. Melalui Uji Koefisien Determinasi (R^2) diketahui bahwa variabel satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat, satuan kerja yang diuji petik BPK RI, dan rasio belanja triwulan IV mampu mempengaruhi kemungkinan *fraud* pada laporan keuangan sebesar 45,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
3. Secara parsial melalui uji *t* diketahui bahwa variabel satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat, satuan kerja yang diuji petik BPK RI, dan rasio belanja triwulan IV berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan *fraud* pada laporan keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapepam. 10 Agustus 2003. Siaran Pers/Press Release Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal.
- Bassil, Kaffi. *Statistikaku, All About Statistik*, diakses 23 Mei 2014. <http://statistikaran.blogspot.com/favicon.ico>
- Bierstaker, James., Brody, Richard., and Pacini, Carl. (2006). Accountants' Perceptions Regarding Fraud Detection and Prevention Methods. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 21 No. 5, pp. 520-35.
- Direktorat Penyusunan APBN. (2013). *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (2014). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir 2013/2014*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Pembanguna Nasional "Veteran" Jakarta
- Faisal, M. (2013). Analisis Fraud di Sektor Pemerintah Kabupaten Kudus. *Accounting Analysis Journal*. AAJ 2 (3)
- Garety, Mason and Lehn, Kenneth (1997). The Causes and Consequences of Accounting Fraud. *Managerial and Decision Economics*. 18: 587-599.
- George, N.. 2009. "The Relationship Between Audit Firm Tenure and Probability of Financial Statement Fraud". *Journal of Academic Business and Economics*. Vol. 9, No. 4, pp.54-65.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Progam IBM SPSS 19. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jatiningtyas, N. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang* (2011). Universitas Diponegoro. Skripsi.
- Kaminski, Kathleen A., Guan, Liming. (2004). Can Finacial Ratios detect *fraudulent* financial reporting. *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 19, 1; Proquest, Pg. 15
- Laporan Keuangan Kementerian. Unaudited. (2013). Jakarta: Kementerian "X" Republik Indonesia.
- Laporan Keuangan Kementerian. Audited. (2012). Jakarta: Kementerian "X" Republik Indonesia.
- Laporan Keuangan Kementerian. Audited. (2011). Jakarta: Kementerian "X" Republik Indonesia.
- Laporan Keuangan Kementerian. Audited. (2010). Jakarta: Kementerian "X" Republik Indonesia.
- Miqdad, Muhammad. (2008). Mengungkap Praktek Kecurangan (Fraud) Pada Korporasi Dan Organisai Publik Melalui Audit Forensik. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 3, Nomor 2*.
- Nabila, Atia. (2013). Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Prespektif *Fraud Triangle*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Najahningrum, Anik. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Analysis Journal*. AAJ 2 (3).
- Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2012*. Diakses 2 April 2014. <http://setagu.net/opini-bpk-atas-laporan-keuangan-kl-tahun-2012/feed/>

- Palmrose, Z. (1988). Litigation and Independent Auditors: The role of Business Failures and Management Fraud. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*.1987. p.90-103.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah* .2010
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah*. 2011
- Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pearsons, O.S. (1995). Using financial statement data to identify factors associated with fraudulent financial reporting. *Journal of Applied Business Research*. Vol. 11 No. 3, pg. 38-46.
- Pristiyanti, I. (2012). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 1 No.1
- Riahi, Ahmed dan Belkaoui. (2006). *Teori Akuntansi, Edisi 5* (Ali Akbar Yulianto dan Risnawati Dermauli, Penerjemah). Jakarta:Salemba Empat.
- Rezaee, Zabihollah. (2005). Causes, consequences, and deterrence of financial statement fraud. *Critical Perspectives on Accounting* Vol.16 277–298.
- Santosa dan Yohanes. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Hal14-33
- Simbolon, Hari. Mengupas Seluk Beluk Fraud dan Cara Mengatasinya. diakses tanggal 5 April 2014. <http://akuntansibisnis.wordpress.com/2010/12/22/mengupas-seluk-beluk-fraud-dan-cara-mengatasinya/>
- Sanusi, Zuraidah. Marjuni, Noor. Mohamed, Norhayati. Johari, Razana. dan Sari, Ria. (2012). The Effect of Internal Control Procedures and Good Governance on Fraud Incidents in Government Agencies.
- Soselisa dan Mukhlisin .(2008). Pengaruh Faktor Kultural Organisasi, Manajemen, Strategik Keuangan, dan Auditor terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak*.
- Stalebrink, Odd J. Sacco, John F. (2007). Rationalization of financial statement fraud in government: An Austrian perspective. *Critical Perspectives on Accounting* 18 489–507.
- Statistik Ceria. Tutorial Contoh Analisis Regresi Logistik Biner/ Dikotomi dengan SPSS.diakses 5Agustus 2014. <http://www.statistikceria.blogspot.com/feeds/posts/default>
- Subroto, Vivi .(2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Karakteristik Auditor Eksternal terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Aset*. Vol 1 No.1.
- _____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.2002.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. 2003.

- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*.2004.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013*.2012.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.2004.
- Yonhendril. (2009). Hubungan Perubahan Belanja Modal Dengan Indikasi Terjadinya Fraud Pada Pemerintah Daerah Di Sumatera. *Tesis*. Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas.